

The Role of Internal Auditors in Supporting the Implementation of the Principles of Transparency and Accountability (Study at PT. Bank Mega Syariah KC. MEDAN)

Peran Auditor Internal dalam Menunjang Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (Studi pada PT. Bank Mega Syariah KC.MEDAN)

Vica Lily Tan Patricia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ vicalilytan01@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Februari 2022]

Revised [10 Maret 2022]

Accepted [20 Maret 2022]

KEYWORDS

Internal Auditor Enrole,
Transparation Principle,
Accountability Principle

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian secara independen yang dibuat dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi banyaknya berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi tersebut dalam memberikan pertanggung jawaban dalam bentuk yang efektif. Kegiatan Audit Internal adalah untuk memberikan rekomendasi dan menilai guna meningkatkan proses tata kelola sebuah perusahaan (Good Corporate Governance), agar mampu mencapai tujuan dan sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada era globalisasi saat ini yang telah memasuki era 4.0, dunia bisnis berkembang telah berkembang dengan sangat pesat. Oleh karena itu, dalam menghadapi hal tersebut, perusahaan/badan usaha perlu meningkatkan penerapan Good Corporate Governance terlebih pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penerapan hal ini juga dipengaruhi oleh adanya peran auditor internal. Semakin berperannya kinerja auditor internal didalam perusahaan tersebut, maka akan meningkatkan penerapan adanya kedua prinsip tersebut. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mega Syariah KC. MEDAN . Perusahaan ini merupakan perusahaan dalam jasa perbankan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dari OJK dan website yang terfokus pada penerapan prinsip transparansi, penerapan prinsip akuntabilitas, serta bagaimana peran auditor internal dalam menunjang pelaksanaan kedua prinsip tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, dan peran auditor internal telah menunjang pelaksanaan kedua prinsip tersebut..

ABSTRACT

Internal Audit is an independent assessment function made within an organization or company with the aim of testing and evaluating the number of various activities carried out by the organization or company. With the aim of assisting the management of the organization in providing accountability in an effective form. Internal Audit activities are to provide recommendations and suggestions in order to improve the governance process of a company (Good Corporate Governance), in order to be able to achieve the goals and targets that have been previously set by the company. In the current era of globalization which has entered the 4.0 era, the developing business world has developed very rapidly. Therefore, in dealing with this, companies/business entities need to improve the implementation of Good Corporate Governance especially on the principles of transparency and accountability. The implementation of this matter is also influenced by the role of the internal auditor. The more the role of the Internal Auditor's performance in the company, the more application of these two principles will be. This research was conducted at PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN. This company is company in a banking service. This research was conducted by taking data from the OJK and the website which focused on the application of the principle of accountability, and the role of internal auditors in supporting the implementation of these two principles. The research indicate that the implementation of the principles of transparency and accountability has been going well, and the role of Internal Auditors has supported implementation of these two principles.

PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau sering disebut dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah merupakan unsur penting di industri perekonomian baik suatu organisasi, perbankan maupun perusahaan. Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan GCG adalah berfungsinya organ-organ yaitu Rapat Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite secara efektif.

Pada saat ini dunia bisnis dan ekonomi pada era globalisasi sudah berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan para pelaku bisnis mendapatkan tantangan yang semakin banyak dan beragam. Salah satu dari tantangan tersebut yang akan dihadapi adalah munculnya perusahaan baru/asing. Hal ini bukan hanya berdampak pada sektor bisnis, namun tantangan ini juga dialami oleh perusahaan di sector

publik. Salah satu acara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara meningkatkan kesadaran setiap perusahaan untuk melaksanakan prinsip GCG terlebih pada prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dipengaruhi oleh peran auditor internal. Auditor internal adalah seseorang yang memiliki kemampuan dibidang keuangan, ia akan melaksanakan analisis dan memberikan saran serta penilaian demi mendukung pencapaian dan tujuan perusahaan. Auditor internal akan memberikan keyakinan pada manajemen untuk melakukan perbaikan atas system pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Peran auditor internal dianggap penting dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang dimana anggota dari audit internal akan dipastikan tidak memiliki hubungan secara khusus terhadap para *stakeholder* atau pemegang saham. Peran auditor internal yang secara independen dapat membantu manajemen dalam mengawasi berlangsungnya penerapan prinsip-prinsip GCG.

Terdapat 5 prinsip dasar pada GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran. Dari 5 prinsip tersebut, prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang paling mendasar dan mempunyai hubungan erat. Prinsip transparansi adalah keterbukaan informasi suatu perusahaan, sedangkan prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsinya, dan pertanggung jawaban setiap departemen dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanpa prinsip transparansi tidak akan ada prinsip akuntabilitas, begitupun sebaliknya, tanpa prinsip akuntabilitas maka tidak akan ada prinsip transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas. Selain itu, pengawasan dapat tercipta jika transparansi terwujud sehingga pemangku kepentingan akan mempunyai informasi yang cukup.

Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Inter Bank (SPFAIB) dan *Internal Audit Charter*, dimana Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh SKAI yang merupakan unit kerja independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris, SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mengevaluasi peranan auditor internal dalam menunjang akan pelaksanaan kedua prinsip tersebut dan sehingga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan dan memperbaiki kedua prinsip tersebut.

LANDASAN TEORI

Auditing

Menurut Report of the Committee on Basic Auditing Concept of the American Accounting Association, *auditing* adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut.

Menurut Mulyadi (2002:8), *auditing* adalah suatu proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan yang bertujuan menetapkan tingkat kesesuaian akan kriteria yang telah disepakati dan hasilnya nanti disampaikan kepada para pemegang saham.

Sedangkan menurut peneliti, audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan, serta bukti pendukungnya yang telah disusun oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka memberikan pendapat atas kelayakan suatu laporan tersebut.

Dalam pelaksanaan audit, beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Proses yang sistematis. Auditing merupakan rangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis dan terstruktur.
- b. Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Hal ini berarti bahwa proses yang dilakukannya secara sistematis merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi yang dibuat oleh individu ataupun entita.
- c. Asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Asersi merupakan pernyataan atau rangkaian pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut.
- d. Menentukan tingkat kesesuaian. Penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dimaksudkan untuk menentukan dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- e. Kriteria yang ditentukan

- f. Menyampaikan hasil-hasilnya

Auditing Dalam Perspektif Syariah dan Prinsipnya

Kebenaran atas catatan keuangan merupakan hal yang juga diharuskan oleh Allah SWT yang dimana tidak boleh ada kelebihan maupun kekurangan atas angka maupun pelaporan transaksi yang sebenarnya. Pemeriksaan atas catatan transaksi keuangan dan pelaporannya dalam akuntansi disebut sebagai auditing. Penerapan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan auditing ini telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam AL-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam surah AL-Jasiah Ayat 18.

Makna dari kata "Syariah" dalam ayat tersebut adalah perintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dan menjadikannya sebagai kerangka atau pedoman dalam melakukan segala hal aktivitas. Dalam hal ini penerapan kata syariah dalam lembaga keuangan maupun perusahaan adalah menetapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya.

Tujuan dan Fungsi Auditing Syariah

Tujuan audit syariah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan mengesahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang auditnya kemudian banyak diacu di berbagai Negara.

Esensi Auditing Syariah

Berdasarkan AAOIFI-GSIFI, audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervise syariah. (Sundaryani:2013)

Audit Internal

- a. **Pengertian Audit Internal.** Audit internal adalah pemeriksaan oleh bagian internal perusahaan terhadap laporan keuangan maupun ketataan terhadap peraturan pemerintah, misalnya peraturan mengenai perpajakan, pasar modal maupun lingkungan hidup. Sehingga diperjelas bahwa audit internal adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal baik itu terhadap laporan keuangan perusahaan maupun kegiatan-kegiatan diluar dari laporan keuangan perusahaan tersebut.
- b. **Tujuan Audit Internal.** Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggung jawaban yang efektif. Tujuan lain dari audit internal adalah membantu manajemen dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dari perusahaan maupun pemerintah.
- c. **Peran dan Tanggung Jawab Audit Internal.** Peran dan tanggung jawab dari auditor internal dibagi menjadi dua, yaitu sebagai jasa *assurances* dan jasa konsultasi. Selain itu peran auditor internal juga meliputi :
 - 1) Mempersiapkan dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Internal Tahunan
 - 2) Menetapkan frekuensi audit, subyek pemeriksaan dan lingkup audit guna untuk mencapai tujuan audit
 - 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efesisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia (SDM) dan kegiatan lainnya
 - 4) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan (whistle-blower)

Standar Profesi Audit Internal

- a. **Independensi** adalah auditor internal harus terbebas dari berbagai pengaruh yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kelompok dalam pertimbangan pengambilan keputusan selama melaksanakan kegiatan pemeriksaan (Tugiman, 2006:2)
- b. **Kompetensi** adalah seorang auditor internal harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tanggung jawab perorangan (SPAI, 2004:16)
- c. **Program Audit** merupakan perencanaan sebuah prosedur serta teknik pemeriksaan yang ditulis secara terstruktur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Tuggal, 2010:3). Program audit terbagi menjadi dua yaitu : Penilaian internal dan penilaian eksternal.
- d. **Tahapan Audit** internal terdiri dari perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. Sehingga hal ini dapat dijadikan indikator bagi sebuah perusahaan dalam menilai bagaimana kinerja audit internal.

Teori Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk mengelola dan meminimalkan risiko guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan (Effendi, 2009:1). Prinsip dari GCG tersebut diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan serta kewajaran. GCG berguna untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawaban kepada para shareholders khususnya, dan juga stakeholders pada umumnya.

Konsep Dasar Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun mengenai kondisi perusahaan. Pedoman pokok dari pelaksanaan prinsip transparansi adalah :

- Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, terarah dan akurat
- Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, serta kondisi keuangan perusahaan tersebut
- Keterbukaan yang diterapkan perusahaan tidak menurangi kewajiban setiap karyawan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan
- Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan perusahaan

Konsep Dasar Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Adapun pedoman pokok dalam prinsip akuntabilitas, antara lain :

- Perusahaan menetapkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak organisasi
- Setiap organ perusahaan atau karyawan harus berkompeten dalam menjalankan tugas
- Memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengelola perusahaan tersebut
- Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja sehingga berhubungan dengan *reward* dan *punishment*

Hubungan Audit Internal dengan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Auditor internal menjadi bagian internal dalam *governance* atau organisasi. Auditor internal sangat berperan untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah terlaksana di dalam suatu perusahaan atau tidak. Hal ini nantinya akan berdampak dalam memberikan kejelasan hak, serta fungsi antar pihak-pihak yang mempunyai kepentingan perusahaan. (Tugiman, 2006:15)

Perbankan Syariah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).

- Bank Umum Syariah (BUS)** Adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank asing secara devisa dan bank modevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembuakan *letter of credit*, dan sebagainya).
- Unit Usaha Syariah (UUS)** Adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai devisa dan bank nodevisa. (Andri Soemitra, 2016:58)
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)** Adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas, BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada PT. Bank Mega Syariah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sekunder yang diambil dari data website, buku, laporan OJK maupun jurnal lainnya.

Untuk riset ini teknik pengujian keaslian informasi yang diterapkan adalah teknik trigulasi. Trigulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data yang memberdayakan hal lainnya di luar data yang ada untuk memastikan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang telah terkumpul tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Transparansi Pada PT. Pertamina Persero

Pada PT. Pertamina Persero pelaksanaan prinsip transparansi sudah berjalan dengan sepenuhnya. Berikut beberapa kegiatan yang terdapat di PT. Pertamina Persero dengan penerapan prinsip transparansi :

- a. **Informasi Kondisi Keuangan.** Bank Mega Syariah (BMS) berhasil mempertahankan kinerja positif meski iklim usaha dihantam pandemic Covid-19. Capaian ini terlihat dari tumbuhnya sejumlah indikator bisnis utama seperti laba bank, penyaluran pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap terjaga. Bank senantiasa menjawab tantangan melalui keunggulan ciri khas perbankan syariah yang berpihak kepada umat. Bank Mega Syariah berkomitmen untuk selalu menjalankan bisnis perbankan syariah selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan yang mengutamakan pengembangan manusia, alam, serta keuntungan (*people, planet and profit*). BMS KC MEDAN telah menerima Laporan Auditor Independen 2020 yang disampaikan Akuntan Publik dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa Prinsip transparansi atas informasi keuangan di PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN sudah berjalan dengan baik, karena sudah memenuhi pedoman pokok pelaksanaan yang berisi informasi yang disediakan meliputi kondisi keuangan.
- b. **Sasaran dan Strategi Perusahaan.** Transparansi dalam hal sasaran dan strategi perusahaan pada PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan belum transparansinya pemimpin perusahaan dalam hal penentuan strategi dan sasaran perusahaan. Sasaran dan strategi perusahaan hanya diketahui oleh para pemegang saham atau para pemimpin perusahaan, sedangkan para karyawan tidak mengetahui apa sasaran dan strategi perusahaan tersebut. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan pedoman prinsip transparansi yang menyatakan bahwa tidak ada batasan informasi mengenai strategi dan sasaran perusahaan.
- c. **Laporan Tahunan.** Pelaporan tahunan yang ada di PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN dilakukan secara tepat waktu yaitu :
 - Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah periode penutupan tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris.
 - Dewan Komisaris mengevaluasi laporan tahunan yang disampaikan Direksi sebelum disampaikan kepada RUPS.
 - Laporan Tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris dan apabila tidak ditandatangani harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - RUPS memberikan keputusan dan pengesahan atas Laporan Tahunan.

Setelah disetujui, laporan tahunan ini akan dijadikan bahan pertimbangan oleh manajemen/pimpinan perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi atas laporan tahunan di PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN berjalan dengan baik, karena sesuai dengan berpedoman pokok pelaksanaan yang menyatakan bahwa informasi yang disediakan tepat waktu dan jelas.

- d. **Kerahasiaan Informasi** PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN dalam menjalankan prinsip transparansi tidak mengurangi kewajiban setiap karyawan untuk mengurangi kewajiban setiap karyawan untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan di bidang kerahasiaan informasi Perbankan disusun untuk menjamin keamanan atas informasi yang dikategorikan rahasia. Perusahaan membuat kebijakan dan peraturan internal untuk melindungi informasi perusahaan yang dikategorikan sebagai informasi rahasia Dan dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga informasi rahasia perusahaan.

Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas Pada PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN

Pada PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN, pelaksanaan prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Berikut adalah kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan kesesuaiannya dengan pokok pelaksanaannya :

Tanggung Jawab Organisasi

Pada PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN sudah dibentuk mengenai tanggung jawab pengorganisasian diantaranya sebagai berikut :

- Panitia pengadaan/lelang harus memiliki kompetensi, kualifikasi teknis dan telah mendapatkan pelatihan proses pengadaan serta memperoleh sertifikasi pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan masa penguasaan.
- Panitia lelang dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Direksi.
- Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu yang dilakukan secara swakelola, pembelian langsung dapat dilaksanakan oleh fungsi operasional.

Hal ini sesuai dengan pedoman pokok akuntabilitas yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organisasi perusahaan. Sehingga pelaksanaan prinsip akuntabilitas atas tanggung jawab organisasi sudah berjalan dengan baik.

Laporan Keuangan Tahunan (*Reward and Punishment*)

Laporan keuangan tahunan di PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN sudah berjalan dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Dengan system:

- a. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- b. Laporan Keuangan Tahunan internal harus tersedia pada saat dibutuhkan.
- c. Direksi menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan operasi Perseroan dan tidak dengan tujuan untuk melakukan manipulasi laba.
- d. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan Bagian Keuangan harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur akuntansi telah dilakukan oleh semua unit kerja.

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka Bank Mega Syariah perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Mega Syariah yang didukung oleh Pelaporan Internal yang memadai, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. BUS telah melaksanakan prinsip transparansi mengenai kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia dan stakeholder yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pada saat penyusunan Laporan GCG, Laporan Tahunan Bank Mega Syariah masih dalam proses penyusunan. Pada periode penilaian sebelumnya Laporan Tahunan selalu disampaikan tepat waktu kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, LPPI, YLKI, Asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pemeringkat, 2 Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 2 Majalah Ekonomi & Keuangan serta menempatkan informasi Laporan Tahunan di homepage bank.
- c. Bank Mega Syariah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada homepage Bank Indonesia.
- d. Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada homepage Bank Indonesia.

Hal ini tentu saja berkaitan dengan pemberian *reward* dan *punishment*. Jika pelaporan lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka akan mengurangi nilai departemen tersebut.

Laporan Kinerja Tahunan (*Reward and Punishment*)

Setiap bulan kepala departemen membuat penilaian terhadap setiap karyawannya. Penilaian ini meliputi kinerja karyawan setiap bulannya, baik dalam berperilaku maupun dalam bekerja. Kegiatan penilaian kinerja ini berkaitan dengan pemberian *reward* dan *punishment* yang akan mempengaruhi nilai indeks tiap karyawan dan berpengaruh terhadap pemberian bonus serta gaji.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas atas laporan kinerja tahunan di PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN berjalan dengan baik.

Peran Auditor Internal Dalam Mmenunjang Pelaksanaan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada PT. Pertamina Persero

- a. **Indepedensi.** Pada PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN peran auditor interna sudah berjalan dengan baik, dikarenakan auditor tidak memihak kepada salah satu pihak dalam melakukan kegiatan audit. Sehingga dalam melakukan kegiatan audit, seorang auditor sudah independen. Secara tidak langsung, hal ini berpengaruh terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- b. **Kompetensi** Kegiatan audit internal di PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN dilakukan oleh auditor internal yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidangnya serta mempunyai prestasi yang bagus dan berkelakuan baik. Calon auditor telah melewati tahapan-tahapan untuk dapat menjadi auditor internal di PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN. Bukan hanya itu, perusahaan juga mempunyai komitmen yang cukup besar dalam meningkatkan kompetensi karyawannya. Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa auditor internal di PT. Pertamina Persero sudah memenuhi Standar Profesi Audit Internal dalam hal kompetensi atau kemampuan professional.

Tahapan

Tahapan audit internal pada PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN ada 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. Perencanaan Pemeriksaan
- b. Pengujian dan Pengevaluasian informasi
- c. Penyampaian hasil audit
- d. Tindak lanjut hasil audit

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan audit internal yang ada di PT. Bank Mega Syariah KC MEDAN sudah sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal (SPA) dan sesuai juga dengan surat keputusan nomor : SKEP/19/P/BD/XII/2012.

Implementasi Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas di Bank Mega Syariah KC MEDAN

- a. Memiliki website resmi perusahaan yang senantiasa selalu di update/diperbarui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh badan regulator.
- b. Selalu mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
- c. Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan bagi setiap organ perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Memiliki system pengendalian yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- e. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki system penghargaan dan sanksi (reward and punishment system)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan lprinsip ltransparansi ldan lakuntabilitas lyang lada ldi IPT. Bank Mega Syariah KC MEDAN lbelum lberjalan ldengan lbaik lsepenuhnya, ldiakenan lmasih lterdapat lkegiatan-kegiatan lyang lbelum lsesuai ldengan lpedoman lpokok lpelaksanaan. Berdasarkan lhasil lvaluasi ldi llatas, lmaka lpeneliti lmemberikan lbeberapa lsaran lgar lauditor linternal ldapat llebih lberperan ldalam lmenunjang lpelaksanaan lprinsip ltransparansi ldan lakuntabilitas. lBerikut ladalah lsarang lyang ldapat ldisampaikan l:

- a. Pimpinan lperusahaan lsebaiknya llebih ltransparan llagi lkepada linternal lperusahaan.
- b. Peran lauditor linternal lsebagai lcounterpart lsebaiknya llebih ldiutamakan. lKarena lperusahaan lmembutuhkan lperan ltersebut luntuk lmengumpulkan ldata lyang ldiperlukan lselama lkegiatan laudit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Agoes, Suksrisno. *Auditing Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik Jilid Satu*. Jakarta: Lembaga, 2012
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Effendi, Arief. *The Power of Good Corporate Governance; Teori dan Implementasi*. Jakarta: Selemba Empat, 2009
- Hery. *Potret Profesi Audit Internal (Di Perusahaan Swasta & BUMN Terkemuka)*. Bandung: Alfabeta, 2020
- Nugroho, D.P. *Pelaksanaan Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG)*, 2012
- Sundaryani, Lilir. *Pengaruh Audit internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG)*, 2013



Tugiman, Hiro. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius, 2006
Tunggal, Amin Widjaja. *Internal Auditing (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Harvarindo, 2010